

Peran Komite Sekolah dan Budaya Organisasi dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan.

Harmaen^{1*}

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram.

*Corresponding Author:

Harmaen

Program Studi Magister Administrasi

Pendidikan Pascasarjana

Universitas Mataram, Indonesia

Email: gmmaen343@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis komite sekolah dan budaya organisasi dalam proses pengambilan keputusan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kajian ini dilakukan melalui pendekatan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik dan kebijakan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa komite sekolah berperan sebagai representasi masyarakat yang dapat memperkuat tata kelola pendidikan berbasis partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara itu, budaya organisasi yang terbuka dan kolaboratif terbukti mampu menciptakan iklim pengambilan keputusan yang demokratis dan berorientasi mutu. Sinergi antara keduanya menjadi faktor penentu dalam menciptakan keputusan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan perubahan zaman. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas komite serta pembudayaan nilai-nilai organisasi yang sehat untuk mendukung tata kelola sekolah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Keputusan Pendidikan, Komite Sekolah, Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Sekolah.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sarana utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, yang memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa dan menjawab tantangan global abad ke-21. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai cara efektif dalam memanusiakan manusia sesuai amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab (Mantiri, 2019). Pendidikan menjadi jaminan penting dalam meningkatkan taraf kehidupan warga negara secara bermartabat dan berkelanjutan (Sulaiman, 2015).

Dalam era disrupsi teknologi dan kompleksitas sosial saat ini, sistem pendidikan nasional dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga adaptif, kritis, kolaboratif, dan berintegritas. Untuk itu, diperlukan sistem pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai budaya nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta mampu mengikuti tren globalisasi dan digitalisasi

(Muhlisin, 2025). Dalam konteks tersebut, pengelolaan pendidikan tidak lagi dapat dilakukan secara sentralistik dan tertutup, melainkan harus didorong oleh prinsip desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Maka dari itu, peningkatan tata kelola pendidikan menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang demokratis, efektif, dan adaptif terhadap tantangan zaman (Yusuf, 2024).

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka mendukung tata kelola pendidikan yang lebih partisipatif dan otonom adalah penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola dan mengembangkan kebijakan internal guna meningkatkan mutu layanan pendidikan dan membangun hubungan erat antara masyarakat, pemerintah, dan sekolah (Mulyai, 2019). Kendati demikian, dalam praktiknya, implementasi MBS di banyak satuan pendidikan masih diwarnai oleh lemahnya partisipasi aktor non-pendidik dalam proses pengambilan keputusan. Keterbatasan pemahaman konsep MBS, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, hingga krisis kepemimpinan kepala sekolah menjadi penyebab dominan dari kurang efektifnya sistem ini (Ayu et al., 2023).

Akibat dari lemahnya partisipasi tersebut, pengambilan keputusan di sekolah seringkali bersifat eksklusif dan tertutup, hanya melibatkan manajemen internal tanpa menjaring aspirasi dari pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, maupun masyarakat luas. Hal ini menimbulkan risiko tidak sesuai kebijakan dengan kebutuhan peserta didik, ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran, hingga resistensi dalam pelaksanaan program-program sekolah. Berbagai keputusan penting seperti pengembangan kurikulum, alokasi sumber daya, dan kebijakan kesiswaan seringkali dibuat tanpa proses konsultatif dan dialogis yang bermakna, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dengan realitas di lapangan.

Dalam konteks ini, komite sekolah hadir sebagai elemen strategis dalam membangun tata kelola pendidikan yang partisipatif. Berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2016, komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan melalui peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung antara masyarakat dan sekolah. Sebagai representasi pemangku kepentingan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, komite sekolah diharapkan dapat berkontribusi dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan pendidikan secara substansial (Ma'ruf, 2025). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa peran komite sekolah masih sering bersifat pasif dan seremonial, terbatas pada kegiatan administratif atau simbolik semata (Misbah, 2009).

Kurangnya efektivitas komite sekolah dalam pengambilan keputusan tidak hanya terkait dengan kapasitas internal komite, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi sekolah. Budaya organisasi mencerminkan sistem nilai, norma, dan praktik sosial yang berkembang di lingkungan sekolah, serta memengaruhi pola pikir, perilaku, dan pengambilan keputusan oleh anggota sekolah (Rony, 2021). Sekolah yang menerapkan budaya terbuka, dialogis, dan kolaboratif cenderung lebih mampu mengintegrasikan partisipasi komite dalam forum strategis. Sebaliknya, budaya organisasi yang bersifat hierarkis dan birokratis akan menghambat keterlibatan komite, menjadikan partisipasi sekadar formalitas belaka (Sari et al., 2022; Hidayati, n.d.).

Dengan demikian, keterlibatan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan sangat erat kaitannya dengan iklim budaya organisasi yang berkembang di sekolah. Budaya organisasi tidak hanya menjadi konteks tempat berlangsungnya proses manajerial, tetapi juga berperan sebagai determinan yang membentuk relasi antaraktor serta arah pengambilan kebijakan. Harmonisasi antara peran aktif

komite sekolah dan budaya organisasi yang suportif menjadi kunci keberhasilan tata kelola pendidikan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

Melihat pentingnya hubungan antara peran komite sekolah dan budaya organisasi dalam mendukung pengambilan keputusan pendidikan, maka kajian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sinergi antara keduanya membentuk mekanisme pengambilan keputusan yang efektif dan partisipatif di sekolah. Penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan secara deskriptif masing-masing variabel, tetapi juga mengeksplorasi keterkaitan fungsional keduanya dalam konteks tata kelola sekolah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas kelembagaan sekolah, pelibatan masyarakat dalam pendidikan, serta pengembangan budaya organisasi yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas dalam dunia pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka atau *systematic literature review* (SLR) sebagai metode utama. Kajian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap isu yang dikaji, yaitu peran komite sekolah dan budaya organisasi dalam pengambilan keputusan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis konseptual dan sintesis tematik berdasarkan berbagai referensi akademik yang telah ada (Sari, 2020).

Studi kepustakaan melibatkan proses sistematis dalam pengumpulan, penelaahan, dan pengorganisasian informasi dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen akademik lainnya. Literatur dikumpulkan melalui akses ke berbagai repositori online dan perpustakaan digital guna merangkum beragam perspektif dan pendekatan yang relevan terhadap fokus kajian. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal nasional dan internasional terakreditasi, artikel ilmiah mutakhir, serta buku akademik dari lima tahun terakhir (Sari, 2020).

Kajian pustaka tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif. Tinjauan literatur dimaknai sebagai proses untuk mengidentifikasi, memahami, serta menyintesis temuan dan gagasan terdahulu secara sistematis dan kritis. Dalam hal ini, peninjauan dilakukan berdasarkan prinsip validitas, relevansi, dan keterbaruan informasi agar mampu memberikan kontribusi teoretis yang

signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan (Hadi & Afandi, 2021).

Proses dalam kajian ini mengacu pada tahapan sistematis yang lazim digunakan dalam *systematic literature review*. Lima tahapan utama yang perlu dilalui antara lain: menentukan istilah pencarian, menggunakan berbagai basis data akademik daring, menyeleksi dan menilai literatur secara kritis, mengorganisasi literatur ke dalam diagram visual atau tematik, serta menyusun ringkasan literatur ke dalam bagian laporan penelitian (Hadi & Afandi, 2021).

Merujuk pada kerangka tersebut, peneliti menyusun prosedur kerja sebagai berikut: (1) menentukan fokus kajian dan kata kunci pencarian; (2) melakukan penelusuran sumber dari basis data seperti Google Scholar, SINTA, DOAJ, dan Scopus; (3) menyaring dan menganalisis sumber yang sesuai dengan topik penelitian; (4) mengorganisasi data berdasarkan tema atau subtopik; (5) menafsirkan dan menyintesis informasi; dan (6) menyusun hasil kajian dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis (Hamdiyati dalam Hadi & Afandi, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria relevansi topik, reputasi akademik penerbit, dan tahun publikasi yang tidak lebih dari lima tahun terakhir. Literatur yang digunakan meliputi buku teks, artikel ilmiah, laporan riset terdahulu, serta regulasi resmi yang berkaitan langsung dengan komite sekolah, budaya organisasi, dan pengambilan keputusan pendidikan. Proses seleksi literatur dilakukan secara ketat untuk menjaga validitas dan keterkinian data yang digunakan dalam kajian ini (Sari, 2020).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan informasi dari berbagai sumber secara sistematis guna membentuk pemahaman konseptual yang utuh. Proses analisis meliputi identifikasi tema utama, pengelompokan informasi, perbandingan antarsumber, pemberian makna atau interpretasi terhadap konten, serta penyusunan sintesis berdasarkan pola dan temuan yang relevan dengan topik (Hadi & Afandi, 2021).

Dengan pendekatan ini, kajian pustaka tidak hanya menjadi sarana pengumpulan informasi, tetapi juga alat analisis ilmiah yang kritis dan reflektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan tata kelola sekolah melalui peran strategis komite sekolah dan budaya organisasi yang inklusif dan demokratis. Temuan dari kajian ini juga dapat menjadi rujukan bagi praktik manajerial di sekolah serta menjadi landasan bagi

penelitian lanjutan di bidang manajemen pendidikan (Muhlisin, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan pendidikan yang partisipatif dan akuntabel. Dalam konteks normatif, komite berfungsi memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi terhadap kebijakan sekolah. Fungsi ini ditegaskan melalui Permendikbud No. 75 Tahun 2016 yang menyatakan komite sebagai mitra kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan (Misbah, 2009). Realitasnya, komite sekolah menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menjamin keterbukaan dan demokratisasi di lingkungan sekolah.

Namun dalam implementasi, banyak komite sekolah masih belum menjalankan fungsi idealnya secara utuh. Komite kerap hanya dilibatkan dalam agenda formal seperti pengesahan anggaran dan rapat tahunan, tanpa kontribusi aktif dalam perumusan kebijakan inti. Temuan Sada (2017) menyatakan bahwa proses partisipatif dalam pengambilan keputusan belum sepenuhnya terintegrasi dalam manajemen sekolah. Ini menandakan masih lemahnya kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam tata kelola pendidikan.

Peran komite sekolah semestinya menjadi kekuatan sosial yang memperkuat tata kelola berbasis masyarakat. Komite sebagai representasi publik memiliki otoritas moral untuk menjamin kebijakan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Komite juga diharapkan mampu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta mengawasi penggunaan dana BOS (Daud, 2024). Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi ini sangat bervariasi antar sekolah.

Faktor utama yang memengaruhi efektivitas komite adalah kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Banyak anggota komite berasal dari latar belakang non-pendidikan, yang mengakibatkan keterbatasan dalam memahami istilah dan regulasi teknis sekolah. Mutia et al. (2025) menegaskan bahwa pelatihan dan pendampingan menjadi kebutuhan mendesak dalam pemberdayaan komite. Tanpa kapasitas yang memadai, fungsi pengawasan dan pertimbangan tidak dapat berjalan optimal.

Gaya kepemimpinan kepala sekolah menjadi variabel penting dalam menentukan sejauh mana komite terlibat dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah yang terbuka dan partisipatif akan memfasilitasi kolaborasi yang sehat dengan komite. Sebaliknya, gaya kepemimpinan otoriter cenderung meminggirkan komite hanya sebagai pelengkap

administratif (Hasibuan, 2022). Praktik seperti ini berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dan menghambat prinsip *good governance* di sekolah.

Komite sekolah juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam studi Zaini et al. (2014), komite yang aktif mampu meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Realita di beberapa sekolah menunjukkan bahwa komunikasi yang kuat antara sekolah dan komite meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Fungsi ini menjadi krusial di tengah tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi dan integritas layanan pendidikan.

Keberhasilan peran komite sangat ditopang oleh budaya organisasi sekolah yang terbuka dan kolaboratif. Sekolah dengan budaya seperti ini cenderung melibatkan komite sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Nurhadi (2021) menegaskan bahwa keterlibatan komite dalam menyusun kurikulum lokal dan program pengembangan karakter sangat ditentukan oleh iklim kerja yang partisipatif. Budaya organisasi menjadi penentu utama antara kemitraan substantif atau sekadar formalitas.

Budaya organisasi yang positif menciptakan ruang musyawarah, saling percaya, dan gotong royong dalam proses pengambilan keputusan. Rony (2021) menekankan bahwa budaya sehat mendorong praktik demokrasi dan memperkuat tata kelola partisipatif. Dalam kenyataan saat ini, masih banyak sekolah yang menjalankan manajemen secara birokratis dan tertutup. Proses *top-down* masih dominan dan membatasi ruang partisipasi komite.

Schein dalam Hakim & Musaddad (2021) menjelaskan bahwa budaya organisasi terbentuk melalui artefak, nilai, dan asumsi dasar yang memengaruhi pola pengambilan keputusan. Sekolah yang mengedepankan musyawarah dan evaluasi terbuka cenderung menghasilkan kebijakan yang adil dan partisipatif. Praktik seperti rapat koordinasi dan forum musyawarah merupakan artefak yang mencerminkan nilai keterbukaan. Realita di sekolah inklusif menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan lebih kontekstual dan diterima luas oleh warga sekolah.

Sebaliknya, sekolah dengan budaya organisasi yang tertutup menghasilkan keputusan yang elitis dan tidak adaptif. Sekolah seperti ini jarang melibatkan komite dalam forum strategis dan hanya memberikan informasi sepihak. Temuan Jurnal et al. (2025) memperlihatkan bahwa lemahnya demokratisasi dalam pengambilan keputusan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi penguatan tata kelola sekolah berbasis partisipasi.

Dalam situasi demikian, komite sekolah kesulitan memainkan perannya secara optimal karena tidak memiliki akses terhadap informasi dan pengaruh dalam forum pengambilan keputusan. Mereka menjadi entitas yang hanya dikonsultasikan setelah keputusan dibuat, bukan bagian dari proses deliberatif. Utaminingsih & Rachmawaty (2023) menyatakan bahwa minimnya ruang partisipasi komite merupakan pengingkaran terhadap prinsip desentralisasi pendidikan. Maka perlu ada upaya sistematis untuk memperluas ruang kolaborasi antara sekolah dan masyarakat.

Sekolah yang mengadopsi budaya organisasi inklusif cenderung membentuk sistem pengambilan keputusan berbasis data dan kolaborasi. Dalam model ini, guru, komite, siswa, dan kepala sekolah duduk bersama menyusun kebijakan yang responsif dan realistis (Iqbal et al., 2018). Lingkungan sekolah seperti ini mendorong dialog yang sehat dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan. Data lapangan menunjukkan bahwa sekolah dengan budaya seperti ini lebih siap menghadapi perubahan kurikulum dan tantangan pendidikan global.

Tantangan utama dalam pengambilan keputusan partisipatif adalah resistensi terhadap perubahan. Nurhikmah et al. (2024) menjelaskan bahwa resistensi muncul karena ketidaksesuaian nilai baru dengan budaya lama yang sudah mengakar. Jika tidak diantisipasi, resistensi ini bisa menghambat implementasi kebijakan baru dan memunculkan konflik internal. Oleh karena itu, transformasi budaya harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Resistensi tidak hanya datang dari guru atau kepala sekolah, tetapi juga dari anggota komite itu sendiri. Ketika tidak dilibatkan sejak awal, komite cenderung menolak kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Abdul Rohman & Gunawan (2023) menyarankan perlunya komunikasi intensif dan pelibatan komite sejak tahap awal perumusan kebijakan. Strategi ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat dukungan terhadap implementasi kebijakan.

Keterlibatan pegawai dan warga sekolah dalam proses pengambilan keputusan juga masih menjadi tantangan. Banyak guru dan staf merasa tidak didengar atau tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam forum formal. Ginting (2013) menyatakan bahwa keterlibatan yang rendah menurunkan motivasi dan komitmen terhadap kebijakan yang dijalankan. Sekolah perlu mengembangkan budaya organisasi yang inklusif untuk memperkuat rasa memiliki terhadap program.

Konflik internal antar pimpinan seperti kepala sekolah dan wakil, atau antara kepala sekolah dan

komite, juga menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan. Konflik ini biasanya dipicu oleh perbedaan visi, gaya kepemimpinan, atau kepentingan pribadi. Anco (2017) menekankan pentingnya mekanisme resolusi konflik yang dialogis dan berbasis musyawarah. Tanpa itu, kebijakan yang dihasilkan rentan tidak efektif dan menimbulkan polarisasi.

Budaya organisasi yang menekankan komunikasi terbuka dan musyawarah menjadi prasyarat penting dalam mencegah konflik. Kreitner & Kinicki dalam Ginting (2013) menyebut bahwa budaya yang sehat akan menjadi perekat sosial yang menjaga harmoni dan produktivitas organisasi. Sekolah perlu membangun forum komunikasi rutin antara pimpinan dan komite sekolah untuk menyatukan visi dan strategi. Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan stabilitas dan kepercayaan antar pihak.

Komite sekolah yang diberdayakan dapat menjadi agen transformasi budaya organisasi di sekolah. Mereka bisa mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan evaluasi berbasis data dalam setiap aspek kebijakan (Mutia et al., 2025). Keberhasilan komite dalam fungsi ini sangat ditentukan oleh sinergi dengan kepala sekolah dan dukungan regulatif dari pemerintah daerah. Dalam konteks saat ini, penguatan kapasitas komite menjadi agenda strategis nasional dalam reformasi tata kelola pendidikan.

Komite juga dapat menjadi aktor moral dalam pendidikan karakter dan penguatan nilai sosial di sekolah. Mereka bisa mendorong program berbasis kearifan lokal yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara holistik (Sada, 2017). Fungsi ini menjadikan komite sebagai penjaga nilai dalam pendidikan, bukan sekadar pelaksana teknis administratif. Di era krisis karakter dan tantangan digitalisasi, peran ini menjadi semakin penting.

Sekolah-sekolah yang menjalin kemitraan kuat dengan komite cenderung memiliki iklim belajar yang sehat dan partisipatif. Mereka menunjukkan tingkat kepuasan orang tua dan keterlibatan masyarakat yang tinggi. Nurhadi (2021) menyebutkan bahwa keterbukaan sekolah terhadap peran komite berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah harus merancang sistem yang memungkinkan komite berperan aktif dalam siklus kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, efektivitas pengambilan keputusan pendidikan sangat ditentukan oleh sinergi antara peran komite sekolah dan budaya organisasi. Komite yang berdaya dan budaya organisasi yang sehat akan menciptakan lingkungan pengambilan keputusan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi mutu (Muhlisin, 2025). Implikasi dari temuan ini mendorong perlunya kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan

komite sekolah dan revitalisasi budaya organisasi. Ke depan, penelitian lanjutan dapat menggali keterkaitan antara efektivitas kepemimpinan, digitalisasi, dan kualitas pengambilan keputusan pendidikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengambilan keputusan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh sinergi antara peran strategis komite sekolah dan kekuatan budaya organisasi yang berkembang di lingkungan sekolah. Komite sekolah yang berdaya, representatif, dan dilibatkan secara aktif mampu menjadi mitra kepala sekolah dalam menyusun kebijakan yang akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, budaya organisasi yang terbuka, inklusif, dan kolaboratif menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim pengambilan keputusan yang demokratis, transparan, dan inovatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan di sekolah bukan hanya soal prosedur administratif, melainkan proses sosial yang melibatkan nilai, dialog, dan komitmen kolektif seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas komite dan transformasi budaya organisasi perlu menjadi prioritas dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan di era desentralisasi dan digital saat ini.

Daftar Pustaka

- Afifah, M. N., Hidayat, D., & Musa, S. (2023). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pendidikan masyarakat di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tim Suara Masyarakat Dawuan Cikampek. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 8(1), 1-15. <https://doi.org/10.30870/e-plus.v8i1.22440>
- Anco. (2017). Budaya organisasi dan pengambilan keputusan. *Shautut Tarbiyah*, 23(1), 1-18. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/shautut-tarbiyah/article/download/576/556>
- Ayu, D., Astari, P., Komang, I., Swarmahardika, P., Prasilia, N., Putri, A., Apsari, P. L., Ayu, I., Trisna, N., Utami, S., Mandabayan, H. C., & Werang, B. R. (2023). Faktor-faktor penghambat implementasi manajemen berbasis sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 7, 29130-29137.
- Daud, R. M. (2024). Revitalisasi peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Sosial*, 4, 143-160.

<https://journal.aripi.or.id/index.php/Nakula/article/view/943>

- Ginting, S. (2013). Karakteristik budaya organisasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. [Skripsi, Universitas Padjadjaran].
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature review is a part of research. *Sultra Educational Journal*, 1(3), 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Hakim, N., & Musaddad, A. (2021). Budaya pengambilan keputusan organisasi (Studi kasus di sekolah menengah pertama swasta Kabupaten Situbondo). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(2).
- Jurnal Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung. (2025). Analisis budaya organisasi dalam pengambilan keputusan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(April), 28–33.
- Ma'ruf, D. (2025, Januari 9). Memahami fungsi komite sekolah agar mampu memaksimalkan perannya majukan sekolah. *Melintas.id*. <https://www.melintas.id/pendidikan/345508894/memahami-fungsi-komite-sekolah-agar-mampu-memaksimalkan-perannya-majukan-sekolah>
- Magister Pendidikan Universitas Syiah Kuala. (2018). Budaya organisasi sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik pada SMA Negeri 1 Kota Lhokseumawe. *Jurnal Pendidikan*, 6(4), 234–241.
- Mantiri, J. (2019). Peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 20–26.
- Misbah, M. (2009). Peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 14(1), 1–15.
- Muhlisin. (2025, Mei 2). *Khittah sistem pendidikan nasional di era disrupsi*. Cakap Media. <https://cakapmedia.com/index.php/2025/05/02/khittah-sistem-pendidikan-nasional-di-era-disrupsi/>
- Nurhikmah, A. A., Cahyani, R. D., Anindia, N. K., Putri, S., Rahayu, R. A., Ekonomi, P., Perkantoran, A., Semarang, U. N., & Organisasi, B. (2024). Tantangan dalam menerapkan budaya organisasi terhadap pengambilan keputusan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(7).
- Pgsd FKIP Universitas Mekkah. (2025). Peran komite sekolah dalam pengambilan kebijakan di SD Negeri 5 Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(1), 43–58.
- Sada, H. J. (2017). Peran masyarakat dalam pendidikan perspektif pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 117. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2120>
- Sari, D. M., Khairani, E. P., Naufal, A., & Ritonga, G. (2022). Pengembangan budaya organisasi di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6, 13413–13418.
- Sari, M. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 41–53.
- Syamsuddin, S. (2018). Peran komite sekolah terhadap penerapan kurikulum. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 151–152. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i1.5151>
- Tinggi, P. (1989). Peningkatan mutu pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi untuk menghadapi era globalisasi.
- Tinggi, S., Islam, A., & Fithrah, A. (2021). Urgensi manajemen budaya organisasi sekolah terhadap pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(1), 98–121.
- Upaya, D., & Kualitas, P. (2019). Peran budaya organisasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. *International Seminar on Islamic Studies*, IAIN Bengkulu, 310–322.
- Utaminingsih, S., & Rachmawaty, S. (2023). Peran budaya organisasi dalam membentuk sikap tanggung jawab sosial guru PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 6808–6817. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5591>
- Yusuf, M. (2024, September 23). Dorong perbaikan tata kelola pendidikan. *Harian Bhirawa*. <https://harianbhirawa.co.id/dorong-perbaikan-tata-kelola-pendidikan/>
- Zaini, A., Zakso, A., & Syukri, M. (2014). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 3(11), 1-13.
<https://media.neliti.com>